

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membantu Gubernur khususnya pada urusan wajib Kebudayaan dan urusan pilihan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata, sedangkan fungsinya adalah penyelenggaraan penyusunan program di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah; pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; penyelenggaraan pelayanan umum; penyelenggaraan pembinaan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata; penyelenggaraan pemfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata Pemerintah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan pemberdayaan sumberdaya aparatur mitra kerja dan masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan permuseuman dan kesenian daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana dalam struktur organisasi yang ada dan diatur pada Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ternyata tidak bisa mengakomodir beberapa aspek kewenangan yang menjadi tanggung jawab dinas, khususnya pada kewenangan urusan pariwisata di mana dalam menjalankan urusan ini secara ideal meliputi dari beberapa hal utama yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan akan tetapi dari struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran, destinasi dan kelembagaan, sedangkan fungsi dari industri tidak tergambar dalam struktur yang ada. Sehingga, dalam pelaksanaan urusan pariwisata masih terjadi ketidakseimbangan beban kinerja di bidang tertentu yang mengharuskan melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan industri pariwisata. Oleh karena hal tersebut, mengakibatkan terganggu dan kurang optimal dalam mencapai target kinerja pada bidang tugas. Hal ini tentunya juga sangat mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Selain itu, perubahan nomenklatur Kementerian yang menangani Pariwisata pada saat ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program karena

selain tidak disertai dengan peraturan teknis yang mengatur kewenangan di daerah, juga menjadi hambatan bagi pencapaian target kinerja program baru atau yang hilang akibat perubahan tersebut. Seperti ekonomi kreatif berbasis media desain dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni budaya yang sekarang dikelola oleh lembaga yang berbentuk badan. Sehingga, kedudukannya urusan ini menjadi tidak jelas.

Kebudayaan yang sudah bergabung dengan Kementerian Pendidikan juga memposisikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan perannya harus berkoordinasi dengan dua Kementerian, tentunya ini membuat Perangkat Daerah harus melakukan upaya yang lebih ekstra dalam berkoordinasi.

Tabel. 1 Ruang Lingkup Pembangunan Kepariwisata



Seperti yang digambarkan dalam skema di atas, ada empat aspek/elemen yang menjadi fokus pembangunan pariwisata yaitu;

1. Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata
3. Pembangunan Industri Pariwisata
4. Kelembagaan Kepariwisata

dari 4 aspek ini tentunya ini dalam pembangunannya tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saja karena pariwisata merupakan pembangunan yang bersifat multi dan lintas sektoral karena meliputi pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, amenitas, masyarakat, industri, pemasaran serta kelembagaan yang hampir kesemuanya melibatkan beberapa

PD teknis tertentu, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informasi, Perbankan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan serta yang lainnya sehingga perlu koordinasi dan sinkronisasi baik pada tataran perencanaan tata ruang maupun perencanaan program pembangunan jangka panjang maupun menengah agar terciptanya sinergitas dan integritas pembangunan di bidang kepariwisataan baik di pusat ataupun daerah. Hal ini menjadi kunci keberhasilan sekaligus tantangan dan hambatan utama yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan.

Pada 4 aspek diatas peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana diatur dalam undang-undang kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 adalah sangat terbatas. Selain hanya memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan destinasi pariwisata secara terbatas dan tertentu saja, peran yang paling utama yang dimiliki berdasarkan kewenangannya adalah menangani pemasaran pariwisata sedangkan yang lainnya sebagian besar adalah urusan PD teknis lainnya.

Tabel.2
SKEMA RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL
TAHUN 2010-2025

VISI	“TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA TUJUAN PARIWISATA BERKELAS DUNIA, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, MAMPU MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”				
MISI	1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat	2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman	3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, dan sosial budaya	4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, SDM, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka	
TUJUAN	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab	3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri	
SASARAN	JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN	JUMLAH PERGERAKAN WISNUS	PENERIMAAN DEvisa DARI PARIWISATA	JUMLAH PENGELUARAN WISNUS	PDB DARI PARIWISATA
PERWILAYAH	50 DESTINASI PARIWISATA NASIONAL 22 KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL 88 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL				

pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu yang menjadi dasar dan pengelompokan program kegiatan bidang kebudayaan pada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik itu pada sasaran budaya benda maupun tak benda, adalah meliputi program yang berorientasi upaya pada 4 aspek di atas yaitu:

1. Perlindungan;
2. Pengembangan;
3. Pemanfaatan; dan
4. Pembinaan.

Pada rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanat dibidang pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai dan mendukung Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

“ BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI ”.

Berikut ini 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yaitu :

- 1) Pengembangan Pembangunan Agropolitan;
- 2) Pembangunan Bahari;
- 3) Pengembangan Pariwisata;
- 4) Pengembangan Tata Kelola Pertambangan;
- 5) Peningkatan Pendapatan Pemerintah;
- 6) Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
- 7) Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan;
- 8) Pembangunan Pendidikan;
- 9) Pembangunan Kesehatan;
- 10) Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Pada point 3 di jelaskan bahwa Pengembangan Pariwisata merupakan sektor unggulan dan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga semua Perangkat Daerah memiliki peran serta termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai kewenangan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan posisi strategis bidang pariwisata dalam menjalankan program kegiatannya untuk mendukung pencapaian visi daerah yang dapat dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :

Strategi :

1. Pengembangan uji kompetensi bagi sumber daya pariwisata.
2. Peningkatan kualitas daya tarik wisata, sarana pariwisata, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.

3. Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata.
4. Peningkatan pelestarian budaya lokal.

Arah Kebijakan :

1. Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya.
2. Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata terintegrasi.
3. Peningkatan kuantitas Sumber Daya Pariwisata yang kompeten dan professional.
4. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi pariwisata.

Sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tugas :

Membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dalam mencapai cita-cita pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

BIDANG KEBUDAYAAN

- 1) Program Pelestarian Budaya, dengan kegiatan :
 - a) Kajian Tradisi Bangka Belitung;
 - b) Penulisan Sejarah Bangka Belitung;
 - c) Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung;
 - d) Partisipasi dan Penghargaan serta Kerjasama di bidang budaya;
 - f) Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI;
 - g) Pengelolaan Cagar Budaya;

- h) Pendokumentasian dan Publikasi koleksi museum daerah;
 - i) Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung;
 - j) Festival Budaya Melayu;
 - k) Pentas Seni Budaya;
 - l) Pembinaan Drumband Serumpun Sebalai.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, dengan kegiatan :
- a) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c) Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah;
 - d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - e) Penyusunan Buku Pariwisata Daerah;
 - f) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - g) Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Ekonomi khusus pariwisata pada sekretariat Dewan Kawasan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
 - h) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Musik Rampak Gendang;
 - i) Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung.

BIDANG PARIWISATA

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :
- a) Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat
 - c) Kegiatan Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya
 - d) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
 - e) Kegiatan Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung
- 2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :
- a) Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung
 - b) Pelayanan Informasi Pariwisata
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran pariwisata Bangka Belitung
 - d) Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam negeri
 - e) Partisipasi Event Promosi Pariwisata
 - f) Pelaksanaan Promosi melalui media
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan, dengan kegiatan :
- a) Partisipasi Event Festival Nusantara
 - b) Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata
 - c) Penyelenggaraan Pemilihan Putra - Putri Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- d) Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Kuliner
- e) Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah

Adapun beberapa sasaran pembangunan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- 1) Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas
- 2) Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar
- 4) Meningkatnya kunjungan pariwisata
- 5) Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata

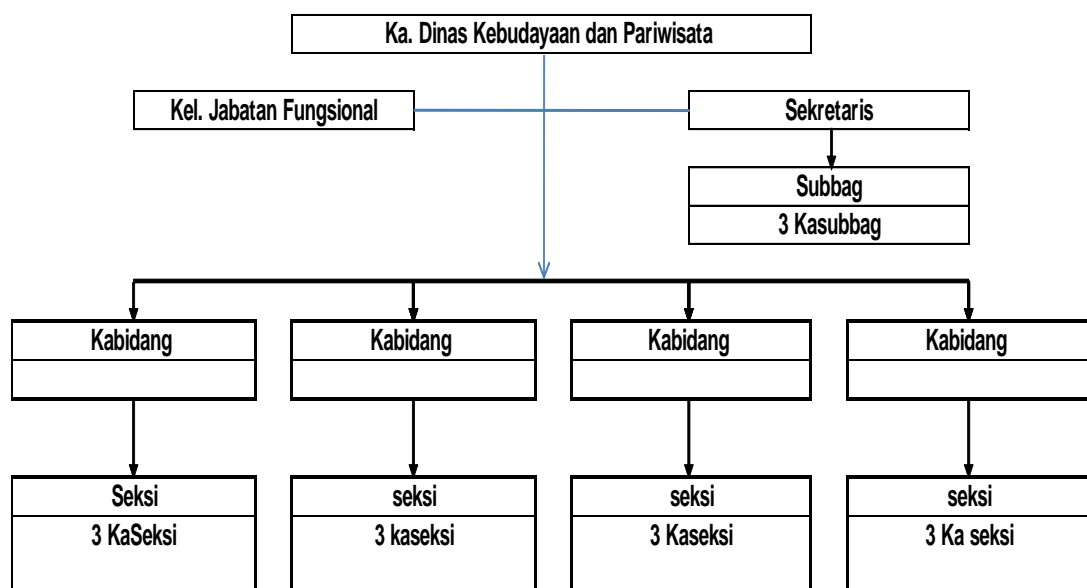
1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Struktur Organisasi dan Tatakerja

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

Struktur Organisasi dinas terdiri dari 1 Kepala Dinas 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang dan 15 Kepala seksi, adapun gambaran struktur dapat dilihat sebagai berikut :

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan urusan wajib Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2019 didukung oleh 87 (delapan puluh enam) orang pegawai, dengan status 64 (enam puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 23 orang honorer, dengan kualifikasi pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 13 orang, Strata-1/Diploma (S-1/D-4) sebanyak 40 orang, Diploma (D-3) sebanyak 8 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 orang.

Tabel. 3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	10	-	10
		Gol. III	46	1	47
		Gol.II	6	1	7
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	13	-	13
		S1	40	-	40
		D. IV	-	-	-
		D. III	7	1	8
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	3	-	3
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	18	-	18
		Fungsional:			
		Tertentu	7	-	7
		Umum	32		32
JUMLAH TOTAL			62	2	64

1.4. Permasalahan Utama dan Isu Strategis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Di dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata pada tahun 2012 sampai dengan 2019 ada beberapa permasalahan dan kebutuhan yang harus diselesaikan dan dipenuhi oleh pemerintah daerah yang menjadi urusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain :

1. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima;

- b) Rendahnya kualitas jaringan aksesibilitas menuju lokasi daya tarik wisata;
 - c) Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas sarana prasarana dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi dsb);
 - d) Rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum pendukung pariwisata (parkir, toilet, mushola, penerangan umum, dll);
 - e) Rendahnya peran serta masyarakat dan partisipasi stakeholders swasta terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - f) Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat.
2. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
- a) Rendahnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri;
 - b) Rendahnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;
 - c) Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama bagi seluruh stakeholder pariwisata;
 - d) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, keterampilan dan bahasa;
 - e) Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
 - f) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.
3. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata
- a) Masih rendahnya pelaksanaan/penerapan sertifikasi standarisasi kualitas Sumber Daya Pariwisata, pelaku ekonomi kreatif maupun kelembagaan kepariwisataan;
 - b) Belum memadainya profesionalitas/kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata di Daya Tarik Wisata dan penunjang kepariwisataan lainnya;
 - c) Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata;
 - d) Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan;
 - e) Belum optimalnya hubungan kemitraan dunia pendidikan dengan stakeholder pariwisata.
4. Permasalahan Pengembangan Kebudayaan
- a) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
 - b) Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
 - c) Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya / benda pusaka.

- d) Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
- e) Kurangnya pengembangan kapasitas nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

Saat ini cara pemasaran pariwisata berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan akibat kurangnya Daya Saing Kepariwisata Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan data hasil rekapitulasi kunjungan wisatawan tahun 2012 sampai dengan 2019 dari kabupaten/kota berikut :

Tabel 4

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KUNJUNGAN WISATAWAN							2019
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Urusan Pariwisata								
Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara	5.540	3.866	3.702	7.620	5.106	7.183	31.685	9.183
Tingkat Kunjungan Wisatawan Nusantara	364.962	376.593	510.367	541.421	342.513	359.901	2.040.338	429.190
	370.502	380.459	514.069	549.041	347.619	367.084	2.072.023	438.373

*) Sumber berita statistik BPSTahun 2012 – 2019

*) Sumber data dari disbudpar Kab / Kota Tahun 2019

dari tabel di atas terlihat terjadi fluktuasi dan ketidak stabilan pertumbuhan serta mengarah ke penurunan/perlambatan pertumbuhan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Tentunya hal ini menjadi permasalahan karena sebagai sektor unggulan yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian daerah ke depan peningkatan dan kestabilan pertumbuhan diharapkan menjadi tujuan pembangunan daerah karena juga dapat menjaga kestabilan/peningkatan perekonomian daerah. Tetapi pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara.

Beberapa aspek yang mempengaruhi melambatnya atau penurunan pertumbuhan misalnya, lemahnya daya saing kepariwisataan Bangka Belitung yang meliputi daya saing destinasi, sumber daya manusia dan pemasaran pariwisata daerah serta mahal biaya transportasi ke destinasi pariwisata.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.3. Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 5 (lima) program yaitu 2 (dua) program kebudayaan dan 3 (tiga) program Pariwisata. Dalam pencapaian targetnya didukung dengan 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Dibawah ini adalah penjelasan terhadap rencana kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis pada tahun 2019.

Tabel 6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

OPD : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Prov. Kep. Bangka Belitung
Tugas Pokok : Urusan Kebudayaan Dan Pariwisata
Tahun Anggaran : 2019

Tabel.7 Target Kinerja 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional
1.	Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas	Persentase sumber daya pariwisata yang berkualitas	8,44%	$\frac{jml\ SDP\ tahun\ ini}{total\ SDP} \times 100\%$
	Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas	Persentase kelembagaan Kepariwisata yang berkualitas	91,67%	$\frac{Jml\ lembaga\ yg\ dibentuk}{Total\ lembaga\ pariwisata\ di\ daerah} \times 100\%$
2.	Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	29,37%	$\frac{jml\ budaya\ yang\ dilestarikan}{total\ budaya\ sesuai\ database} \times 100\%$
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Persentase sarana prasarana di Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar	44,44%	$\frac{jml\ dokumen\ destinasi\ provinsi\ yang\ tersusun}{total\ dokumen\ destinasi\ provinsi\ teregulasi} \times 100\%$
4.	Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase kunjungan wisatawan	24,00% 427.598 (wisnus) 8.378 (wisman)	$\frac{jml\ capaian\ kunjungan\ wisatawan\ se - kab/kota}{jml\ kunjungan\ wisatawan\ yang\ direncanakan\ se - kab/kota} \times 100\%$

sasaran strategis ini merupakan sasaran strategis dari dua urusan yang menjadi tanggung jawab PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu, urusan kebudayaan dan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masing-masing urusan memiliki Program-program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai mencapai tujuan PD yaitu : **‘MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN BERBASIS BUDAYA LOKAL’**”.

Pencapaian target sasaran program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas direncanakan dapat mendukung upaya pencapaian target kinerja utama dinas baik untuk urusan kebudayaan maupun urusan pariwisata.

2.3.1 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pada pada tabel 7 merupakan sasaran strategis program-program yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ada 5 (lima) sasaran strategis dengan delapan program sebagai pendukung tercapai target sasarnya.

Berdasarkan urusannya sasaran strategis ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok sasaran yaitu :

- 1) Umum atau bersama (rutin) yang mendukung mencapai target 2 urusan kebudayaan dan pariwisata
- 2) Urusan Wajib atau Kebudayaan yang mendukung mencapai target urusan kebudayaan
- 3) Urusan Pilihan atau Pariwisata yang mendukung mencapai target urusan pariwisata.

1) SASARAN STRATEGIS URUSAN KEBUDAYAAN:

a) Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah

Dalam upaya pencapaian target pada sasaran strategis bidang kebudayaan “meningkatkan budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata” dengan indikator kinerja utamanya yaitu persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 2 (dua) Program dengan dengan 22 Kegiatan.

Program Bidang Kebudayaan terdiri dari program yang bertujuan untuk Pelestarian kebudayaan daerah yang terdiri dari upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagai upaya pelestarian. Di dalam pelaksanaannya kadangkala program mempunyai peran sebagai upaya perlindungan, upaya pemanfaatan, upaya pengembangan dan pembinaan.

Program-program ini berperan untuk mendukung capaian indikator kunci dan indikator utama Dinas untuk tercapainya target sasaran PD yaitu Meningkatkan budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor

pariwisata “Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata”.

2) SASARAN STRATEGIS URUSAN PARIWISATA:

Sasaran strategis PD ini didukung oleh sasaran yang ada pada tiap program di Bidang Pariwisata sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas
2. Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas
3. Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar
4. Meningkatnya kunjungan pariwisata.

Dalam mencapai target kinerja utama bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung dengan 3 Program dengan 16 kegiatan.

Program ini terdiri dari :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Destinasi dan;
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata.

Pelaksanaan dari ketiga program ini adalah upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan pada 4 (empat) aspek Pembangunan Pariwisata yang terdiri dari Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan dan Industri Pariwisata.

Pemasaran Pariwisata merupakan aspek yang dapat diintervensi secara signifikan karena kewenangannya yang dimiliki dinas cukup luas. Sedangkan untuk aspek Destinasi yang terkait dengan aksesibilitas, prasarana umum, amenitas dan industri hanya bisa diintervensi secara terbatas karena kewenangannya tersebar di PD terkait lainnya seperti Dinas PUPR, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja dan yang lainnya.

Hal yang paling mendasar harus dipahami bawah pariwisata adalah sebuah produk jasa. Daya saing produknya terbentuk bila terjadi keselarasan pada empat aspek tersebut terutama pada aspek jasa layanan yang ada pada aspek tersebut. Profesionalitas dan Standarisasi layanan merupakan kebutuhan utama dalam mengembangkan produk wisata yang juga harus dilengkapi dengan keunikan lokal (kekhasan) sebagai daya tarik produk.

Program Pengembangan Destinasi dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata adalah upaya dalam membangun produk wisata baik secara fisik maupun non fisik termasuk membangun masyarakat yang berwawasan kepariwisataan sebagai pelengkap dan penguat daya saing kepariwisataan suatu daerah. Sedangkan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata merupakan upaya menjadikan sebagai

sebagai produk yang menarik dan bernilai ekonomi tinggi melalui strategis pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan atau pengenalan produk unggulan yang menjadi daya tarik khas daerah kepada wisatawan dan membangun serta mempermudah jaringan informasi dan komunikasi kepariwisataan daerah kepada wisatawan. Mengikuti event event wisata, memanfaatkan media informasi dan teknologi serta membangun jaringan usaha pariwisata dengan pasar potensial yang ada melalui kerjasama merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan program pemasaran pariwisata. Strategi ini tentunya pada akhir bertujuan agar para wisatawan dapat menerima produk wisata daerah sebagai pilihan utama mereka untuk melakukan aktivitas pariwisata di daerah baik yang bersipat wisata alam, budaya maupun buatan. Tentunya keberhasilan pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang cukup besar dan juga diimbangi dengan kontribusi ekonomi sektor ini pada pembangunan ekonomi daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam hal menilai atau mengukur Kinerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya harus dilihat dari capaian kinerja dinas terhadap target dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, terutama terhadap indikator kunci atau utama baik di dalam rencana strategis dinas maupun yang di RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masing-masing indikator merupakan alat ukur dari pencapaian dan keberhasilan dinas dalam menjalankan dan menangani permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menangani dua urusan yaitu, urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Wajib yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kebudayaan dan sebagai urusan pilihannya adalah pariwisata.

Memperhatikan dan menilai terhadap regulasi/kebijakan yang dapat dijadikan landasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, maka penetapan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Destinasi Unggulan melalui Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia diharapkan dapat memperkuat kedudukan kepariwisataan Bangka Belitung dalam upaya mewujudkan dan mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi destinasi internasional.

Dalam pengukuran kinerja tahun ini masih ada beberapa hal yang mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan sistematika penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH pada umumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra PD dimana Renstra PD masih belum dilakukan review sehingga ada beberapa indikator yang belum bersinergi.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Dalam mengukur kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, alat ukur yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama ada 4 (empat) untuk urusan Pariwisata yaitu :

1. Persentase sumber daya pariwisata yang berkualitas.
2. Persentase kelembagaan Kepariwisata yang berkualitas.
3. Persentase sarana prasarana di Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar.

4. Persentase kunjungan wisatawan.

Sedangkan untuk urusan kebudayaan indikator kinerja utamanya adalah **Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata**. Indikator Kinerja Utama Dinas adalah untuk mencapai tujuan utama Perangkat Daerah pada kedua urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Pencapaian target Indikator ini didukung oleh indikator kinerja kunci dari sasaran tiap urusannya yaitu : **Jumlah Wisatawan Nusantara** dan **Jumlah Wisatawan Mancanegara**.

3.1.1 CAPAIAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2019 DAN PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2018

Pengukuran kinerja urusan kebudayaan dilakukan secara kuantitatif yaitu bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mencapai target yang sudah ditetapkan setiap tahun atau dalam 5 tahun yang berlaku rencana strategis PD. Pada Urusan Pariwisata pengukuran dilakukan melihat jumlah capaian setiap tahunnya yang kemudian diukur pertumbuhan capaiannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini terutama untuk menilai sejauh mana Program-program yang dilaksanakan dapat mengintervensi capaian kinerja Dinas atau PD terdapat pada tabel berikut.

Tabel 8
Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			+/- (%)	KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	Persentase budaya local yang dilestarikan dalam mendukung sector pariwisata	17,29%	17,29%	100%	29,37%	29,04%	98,88%	1.12	
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Persentase sarana prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standard	18,54%	0%	0%	44,44%	44,44%	100%	-100	
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan	392.292 (16%)	417.818	104,71%	427.598 (24%)	429.190	100,71%	4	Wisnus (BPS)
			7.758 (16%)	8.124	109,59%	8.378 (24%)	9.183	109,61%	-0.02	Wisman (BPS)
4.	Meningkatnya jumlah sumber daya pariwisata yang berkualitas	Persentase sumberdaya pariwisata yang berkualitas	4,29%	4,29%	100%	8,44%	8,42%	99,76%	0.24	
5.	Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang berkualitas	83,33%	83,33%	100%	100%	91,67%	100%	0	

Tabel. 9
Kecenderungan pertumbuhan pariwisata Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2019 berdasarkan data BPS .

INDIKATOR	RATA-RATA TAHUN 2019
Kontribusi terhadap PDRB	0,083%

i. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Pada prinsip sasaran pada program-program di Bidang Pariwisata adalah untuk mendukung tercapainya target indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata yaitu **Jumlah Kunjungan Wisatawan** dengan sasaran kinerja kuncinya meningkatnya **Jumlah Wisatawan Mancanegara 8 %** pertahun dan **Jumlah Wisatawan Nusantara 8 %** pertahun.

Dari 3 Program yang dilaksanakan di bidang pariwisata masing-masing berkontribusi dalam membangun 4 aspek pembangunan Kepariwisata (Destinasi, Pemasaran, industri kelembagaan) sebagai berikut:

Program Pengembangan Destinasi dan Program Pengembangan Kemitraan mempunyai peran dalam membangun unsur-unsur yang ada dalam destinasi, seperti; daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, dan membangun masyarakat pariwisata serta termasuk kelembagaan, industri dan kebijakan pembangunan kepariwisataan. Memang tidak semua unsur yang bisa diintervensi melalui program ini karena keterbatasan kewenangan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Seperti aksesibilitas dan sarana prasarana umum serta industri pariwisata yang pembangunannya dilakukan bersama-sama dengan OPD teknis lainnya. Upaya yang dilakukan pada tahun 2019 dalam program-program ini antara lain : pengembangan dan pengenalan produk wisata, fasilitasi dan peningkatan kapasitas terhadap lembaga, pelaku dan industri pariwisata serta masyarakat pariwisata.

Pada Program Pengembangan Pemasaran mempunyai peran dalam mengenalkan produk-produk wisata, seperti destinasi maupun daya tarik wisata. Mengembangkan dan mengelola sarana serta media informasi dan promosi pariwisata, memfasilitasi dan mendukung event-event pariwisata serta melakukan dan membangun jaringan kerjasama pengembangan pasar pariwisata dengan *stakeholder* dan mitra pariwisata.

Pada tahun 2019 hampir semua upaya itu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di program ini. Dalam pembagian peran ini Program Pengembangan Destinasi dan Pengembangan Kemitraan mempunyai peran dalam membangun kualitas dan daya saing produk pariwisata sedangkan Program Pemasaran sebagai program dinas yang indikator capaian programnya menjadi indikator kinerja utama PD di bidang pariwisata berfungsi sebagai program hilir yang mempunyai peran dalam mendekatkan produk wisata Bangka Belitung ke pasar eksisting dan pasar potensial wisatawan kita. Sehingga mempunyai peran yang saling terkait antara kesesuaian produk dan kebutuhan pasar wisata sehingga berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung. Berikut adalah jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Target kunjungan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dihitung dengan target angka pertumbuhan 8% untuk wisatawan mancanegara dan 8% untuk wisatawan nusantara. Dalam pencapaiannya pertumbuhan jumlah wisman cenderung stabil dan beberapa daerah mengalami peningkatan yang sangat besar, hal ini mungkin disebabkan oleh berapa event dengan skala cukup besar diselenggarakan di beberapa kabupaten seperti Sungailiat Triathlon di kabupaten Bangka, Wonderful Sail Indonesia yang meliputi beberapa kabupaten serta event promosi pariwisata baik di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung sehingga capaiannya diatas angka pertumbuhan 8 % yang ditargetkan. Capaian pada tahun 2019 untuk kunjungan wisatawan adalah sebanyak 438.373 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 13% dari tahun sebelumnya sebesar 9,49%.

Analisa Capaian Kinerja Utama Pariwisata

Dari tabel kunjungan dapat dilihat bahwa pasar potensial pariwisata Bangka Belitung yang paling dominan memang masih pada wisatawan nusantara. Tingkat kunjungan wisatawan nusantara Bangka Belitung cenderung stabil sedangkan wisatawan mancanegara masih sangat tergantung dengan banyaknya promosi luar negeri dan event-event skala internasional. Apabila dilihat dari total keseluruhan kunjungan di kabupaten/kota pada tahun 2018 terjadi penurunan untuk kunjungan wisatawan nusantara tetapi kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan dengan menggunakan sumber data dari BPS. Kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan baik kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara.

Hal ini menggambarkan keberlanjutan program kegiatan mulai mempengaruhi tingkat kunjungan terutama terhadap pasar Wisatawan Mancanegara. Sehingga memang kalau kita mau menarik kunjungan wisatawan Mancanegara harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran pada pasar-pasar eksisting dan potensial di luar negeri serta menyelenggarakan event-event yang berskala internasional dan yang paling penting adalah segera menyusun kajian

atau analisa pasar pariwisata Bangka Belitung agar pemasaran dapat dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Pada tahun 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memiliki RIPPAPROV dengan masa laku 2016-2025 dan sudah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Tentunya dengan diperdakan RIPPAPROV ini nanti diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan yang berketetapan hukum yang diharapkan dapat menjaga konsistensi dan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan daerah terutama dalam mengatasi permasalahan gesekan kepentingan dengan sektor lain dalam pemanfaatan ruang dan wilayah.

2) Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Pada dasarnya program-program pada bidang kebudayaan berdasarkan indikator kinerja utamanya Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata terbagi pada 2 sasaran yaitu meningkatnya Pelestarian **Warisan Budaya Tak Benda** dan Pelestarian **Warisan Budaya Benda**. Oleh karena itu, evaluasi kinerja bidang kebudayaan diukur melalui keberhasilan dalam mencapai target kinerja tersebut diatas.

Pelestarian kebudayaan daerah adalah upaya perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap budaya daerah yang meliputi dua unsur bentuk budaya, yaitu budaya benda dan tak benda.

Sejauh mana keberhasilan pelestarian suatu kebudayaan tentunya adalah bagaimana budaya dapat terlindungi, berkembang dan memiliki manfaat dalam membangun jati diri serta mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Tentunya suatu budaya dapat dilihat berkembang dan lestari bila didukung dan diakui oleh masyarakat luas khususnya masyarakat itu sendiri. Selanjutnya bila eksistensi kebudayaan itu sangat dominan maka akan diakui ditingkat yang lebih tinggi misalnya tingkat nasional atau bahkan tingkat dunia. Lalu, sejauh mana pengaruh kebudayaan daerah Bangka Belitung di tingkat daerah, nasional atau tingkat dunia.

Pada Warisan Budaya yang bersipat kebendaan Bangka Belitung memiliki potensi yang cukup besar. terutama pada tinggalan masa penjajahan dan kemerdekaan, seperti Wisma Ranggam dan Sasana Menumbing di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu juga ditemukan tinggalan jaman awal sejarah yaitu yang terdapat di Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka yang merupakan tinggalan Hindu pada abad 1 s.d 5 masehi. Terkait cagar Budaya, Bangka Belitung sudah memiliki 15 cagar budaya yang telah ditetapkan oleh kementerian dan tersebar di kabupaten/kota yang harus dilakukan pelestariannya sesuai dengan kewenangannya.

Program dinas yang bersifat perlindungan terhadap warisan budaya terbagi antara lain:

a) Capaian Kinerja Terhadap Indikator Utama (Warisan Budaya Tak Benda)

Berdasarkan Target Kinerja Utama Bidang Kebudayaan untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda, pada tahun 2019 capaian kinerjanya adalah 4 warisan budaya tak benda. Hal ini dikarenakan dari target 12 warisan budaya tak benda (nilai-nilai budaya) yang harus dilestarikan dapat direalisasikan capaiannya sebesar 4 warisan budaya tak benda daerah. Pencapaian ini dilakukan melalui Program Pelestarian Budaya yang meliputi tradisi, Campak, Dambus, Rudat, Rebana, Satra Lisan, Pencetakan buku Pakaian Adat, Upacara Adat dan rumah Adat.

b) Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (Pelestarian Warisan Budaya Benda)

Pelestarian warisan benda pada tahun ini dilakukan khususnya melalui program Pengelolaan Keragaman Budaya pada sub kegiatan yaitu, Pengelolaan Peninggalan Purbakala. Pengelolaan Peninggalan Purbakala merupakan upaya pelestarian terhadap Wisma Ragam (Pesanggrahan Muntok) yang pada saat ini pengelolaannya sudah menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Capaian kinerja tahun 2019 dari rencana sebanyak 1 upaya pelestarian benda cagar budaya hanya dapat direalisasikan 1 (satu) upaya pelestarian budaya benda atau sebesar 100% terhadap target yang ditetapkan sebesar 1 warisan budaya benda yang dilestarikan.

Selain itu belum selesai Undang-undang Tentang Kebudayaan yang sedang disusun oleh pusat juga menjadi kendala untuk daerah dalam menyusun masterplan pembangunan kebudayaan daerah sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pusat terkait percepatan penyelesaian undang-undang tersebut. Daerah juga harus melakukan percepatan dalam membentuk tim Ahli Cagar Budaya di daerah agar inventarisasi dan penetapan cagar budaya dengan skala tingkat daerah masing-masing dapat dilaksanakan. Hal ini perlu dilaksanakan untuk payung hukum perlindungan cagar budaya di daerah yang belum termasuk dalam benda cagar budaya yang ditetapkan oleh pusat.

Pencapaian untuk pelestarian warisan budaya benda menjadi terhambat dikarenakan untuk penetapan cagar budaya di daerah di perlukan Tim Ahli yang bersertifikasi dimana belum jelas kelengkapan teknis, seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya menjadi permasalahan hampir di semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga sampai saat ini upaya pelestarian hanya dilakukan pada cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Secara keseluruhan capaian bidang kebudayaan adalah 56% atau hanya 9 warisan budaya yang dilestarikan dari target 16 warisan budaya.

Pada penerapan SPM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi sudah dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam SPM bidang kesenian, baik pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian maupun pada sarana prasarana bidang kesenian dengan capaian sebagian besar 100%

bahkan beberapa melampau dari yang sudah ditetapkan dalam target pelayanan minimal bidang kesenian.

Permasalahan Umum

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan tantangan dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan datang ke Bangka Belitung, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan bidang – bidang tugas, antara lain :

1. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima;
 - b) Rendahnya kualitas jaringan aksesibilitas menuju lokasi daya tarik wisata;
 - c) Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas sarpras dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi dsb);
 - d) Rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum pendukung pariwisata (parkir, toilet, mushola, penerangan umum, dll);
 - e) Belum optimalnya pengembangan dan penataan bandara internasional baru yang kapabelitasnya dapat meningkatkan aksesibilitas dan services;
 - f) Rendahnya peran serta masyarakat dan partisipasi stakeholders swasta terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - g) Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat.
2. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
 - a. Rendahnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri;
 - b. Rendahnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;
 - c. Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama bagi seluruh stakeholder pariwisata;
 - d. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;
 - e. Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
 - f. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.

3. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata
 - a) Masih rendahnya pelaksanaan/penerapan sertifikasi standarisasi kualitas Sumber Daya Pariwisata, pelaku ekonomi kreatif maupun kelembagaan kepariwisataan;
 - b) Belum memadainya profesionalitas/kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata di Daya Tarik Wisata dan penunjang kepariwisataan lainnya;
 - c) Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata;
 - d) Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan;
 - e) Belum optimalnya hubungan kemitraan dunia pendidikan dengan stakeholder pariwisata.
4. Permasalahan Pengembangan Kebudayaan
 - a) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
 - b) Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
 - c) Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya / benda pusaka.
 - d) Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
 - e) Kurangnya pengembangan kapasitas nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari.
 - f) Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam penanganan masalah yang terjadi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pariwisata.
2. Meningkatkan sinergitas kerjasama dan kemitraan antar *stakeholder* pariwisata.
3. Melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.
4. Untuk menghindari terjadinya perbenturan kepentingan perlunya dilakukan zonasi khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (laut) secara terintegrasi dengan RTRW, Rencana pengembangan kawasan di berbagai sektor terkait.
5. Mengoptimalkan promosi/pemasaran bersama bagi seluruh stakeholder pariwisata.
6. Segera melakukan penyusunan rencana detail pengembangan kawasan yang sudah ditetapkan dalam RIPPAPROV baik di kawasan strategis maupun kawasan pengembangan sesuai dengan peruntukannya.
7. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian dan PD terkait serta *stakeholder* di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

8. Percepatan dan peningkatan program kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan teknis kepariwisataan dan juga berusaha menginisiasi dan memfasilitasi terbentuknya lembaga yang berperan mengeluarkan legalitas standarisasi baik lembaga sertifikasi profesi (LSP) maupun lembaga sertifikasi Usaha Pariwisata. Lembaga ini dibutuhkan dalam percepatan pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja profesional dan usaha di daerah karena dari hasil sertifikasi ini kapasitas tenaga kerja daerah dan industri wisata kita akan dapat diakui di tingkat ASEAN, terutama dengan berlakunya MEA.

Tabel 9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang telah dicapai

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI	% EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya jumlah sumber daya pariwisata yang berkualitas	Persentase sumberdaya pariwisata yang berkualitas	8,44%	8,42%	99,76%	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	3,357,413,000	2,518,089,386	839,323,614	25
2.	Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang berkualitas	91,67%	91,67%	100%					
3.	Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	Persentase budaya local yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	29,37%	29,04%	98,88%	Program Pelestarian Budaya	5,500,543,500	4,305,364,916	1,041,717,684	18.94
4.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan	8.378 (16%)	9.183 (16%)	109,61%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6,209,583,650	5,626,476,815	583,106,835	9.39
			427.598 (16%)	429.190 (16%)	100,71%					
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Persentase sarana prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standard	44,44%	44,44%	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,259,870,000	962,052,516	262,760,784	20.86

3.2 REALISASI ANGGARAN

**PELAKSANAAN APBD
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2019								
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG								
No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	35,963,039,803.95	36,123,158,928.00	99.58	29,587,313,774.00	81.91	6,535,845,154.00	18.09
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,488,064,078.95	9,768,079,403.00	100.00	9,023,902,426.00	92.38	744,176,977.00	7.62
	Belanja Pegawai	8,488,064,078.95	9,768,079,403.00	100.00	9,023,902,426.00	92.38	744,176,977.00	7.62
II	BELANJA LANGSUNG	27,474,975,725.00	26,355,079,525.00	99.16	20,563,411,348.00	78.02	5,791,668,177.00	21.98
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	10,819,821,875.00	10,027,669,375.00	96.14	7,151,427,715.00	71.32	2,876,241,660.00	28.68
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,830,669,675.00	4,732,469,675.00	100.00	4,394,161,792.00	92.85	338,307,883.00	7.15
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100.00		91.23	196,526,720.00	8.77

		1,061,500,000.00	2,240,160,700.00		2,043,633,980.00			
3	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	326,325,000.00	-	100.00	-	-	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	157,425,700.00	215,425,000.00	100.00	128,731,205.00	59.76	86,693,795.00	40.24
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,864,000.00	225,801,500.00	100.00	209,782,000.00	92.91	16,019,500.00	7.09
6	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Ekonomi khusus pariwisata pada sekretariat Dewan Kawasan Provinsi Kep. Bangka Belitung	79,900,000.00	63,100,000.00	100.00	14,250,000.00	22.58	48,850,000.00	77.42
7	Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	271,357,500.00	271,357,500.00	100.00	235,225,338.00	86.68	36,132,162.00	13.32
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	66,780,000.00	86,055,000.00	100.00	76,143,400.00	88.48	9,911,600.00	11.52
9	Pembelian Rumah Peninggalan Sejarah	5,000,000,000.00	2,193,300,000.00	65.25	49,500,000.00	2.26	2,143,800,000.00	97.74
B	Program Pelestarian Budaya	5,004,887,500.00	5,500,543,500.00	106.06	4,305,364,916.00	78.27	1,041,717,684.00	18.94
10	Kajian Tradisi Bangka Belitung	105,733,000.00	105,733,000.00	100.00	94,555,200.00	89.43	11,177,800.00	10.57
11	Penulisan Sejarah Bangka Belitung	172,693,000.00	372,693,000.00	100.00	315,427,060.00	84.63	57,265,940.00	15.37
12	Partisipasi dan Penghargaan serta Kerjasama di bidang budaya	1,940,820,000.00	1,902,880,000.00	166.67	1,512,210,480.00	79.47	390,669,520.00	20.53
13	Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	343,016,500.00	343,016,500.00	100.00	314,824,000.00	91.78	28,192,500.00	8.22
14	Pengelolaan Cagar Budaya	115,700,000.00	115,700,000.00	100.00	101,198,640.00	87.47	14,501,360.00	12.53
15	Pendokumentasian dan Publikasi koleksi museum daerah	60,157,000.00	60,157,000.00	100.00	59,545,000.00	98.98	612,000.00	1.02
16	Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung	32,558,000.00	32,558,000.00	100.00	23,930,000.00	73.50	8,628,000.00	26.50

17	Festival Budaya Melayu	930,711,000.00	930,711,000.00	100.00	653,435,036.00	70.21	277,275,964.00	29.79
18	Pentas Seni Budaya	882,750,000.00	882,750,000.00	100.00	633,740,000.00	71.79	249,010,000.00	28.21
19	Pembinaan Drumband Serumpun Sebalai	229,535,000.00	269,535,000.00	100.00	265,150,400.00	98.37	4,384,600.00	1.63
20	Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	191,214,000.00	484,810,000.00	100.00	331,349,100.00	68.35	153,460,900.00	31.65
C	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,511,797,000.00	1,259,870,000.00	101.00	962,052,516.00	76.36	262,760,784.00	20.86
21	Penyusunan Paket Wisata	186,400,000.00	186,400,000.00	100.00	151,343,300.00	81.19	35,056,700.00	18.81
22	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata	134,411,000.00	134,411,000.00	100.00	114,256,700.00	85.01	20,154,300.00	14.99
22	Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata	145,995,000.00	145,995,000.00	105.00	122,221,875.00	83.72	23,773,125.00	16.28
23	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	98,670,000.00	98,670,000.00	100.00	88,146,100.00	89.33	10,523,900.00	10.67
24	Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung	191,597,000.00	-	-	-	-	-	-
25	Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi	754,724,000.00	694,394,000.00	100.00	486,084,541.00	70.00	208,309,459.00	30.00
26	Sosialisasi Paket Wisata Edukatif dan Kreatif di Desa Wisata Pulau Belitung	-	-	-	-	-	-	-
D	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6,638,233,650.00	6,209,583,650.00	100.54	5,626,476,815.00	90.61	583,106,835.00	9.39
27	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (bahan promosi)	535,835,000.00	911,985,000.00	100.00	867,905,450.00	95.17	44,079,550.00	4.83
28	Pelayanan Informasi Pariwisata	96,001,400.00	496,001,400.00	100.00	402,018,164.00	81.05	93,983,236.00	18.95

29	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	72,890,000.00	380,190,000.00	100.00	376,377,411.00	99.00	3,812,589.00	1.00
30	Pembuatan Bahan Publikasi	150,000,000.00	441,400,000.00	100.00	437,398,000.00	99.09	4,002,000.00	0.91
31	Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	99,596,250.00	99,596,250.00	100.00	97,526,020.00	97.92	2,070,230.00	2.08
32	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	221,200,000.00	221,200,000.00	100.00	201,264,170.00	90.99	19,935,830.00	9.01
33	Partisipasi Event Promosi Pariwisata	1,932,725,000.00	1,932,725,000.00	150.00	1,707,037,400.00	88.32	225,687,600.00	11.68
34	Pelaksanaan Fam Trip	142,186,000.00	142,186,000.00	100.00	109,155,500.00	76.77	33,030,500.00	23.23
35	Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	2,988,100,000.00	1,005,100,000.00	100.00	947,800,000.00	94.30	57,300,000.00	5.70
36	Pelaksanaan Promosi Geowisata	97,950,000.00	97,950,000.00	100.00	83,972,500.00	85.73	13,977,500.00	14.27
37	Pengembangan promosi wisata edukatif, kreatif dan minat khusus bahari	71,800,000.00	71,800,000.00	56.50	13,894,900.00	19.35	57,905,100.00	80.65
38	Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	229,950,000.00	409,450,000.00	100.00	382,127,300.00	93.33	27,322,700.00	6.67
E	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	3,500,235,700.00	3,357,413,000.00	92.06	2,518,089,386.00	75.00	839,323,614.00	25.00
39	Partisipasi Event Festival Nusantara	633,482,700.00	538,882,000.00	53.33	256,934,583.00	47.68	281,947,417.00	52.32
40	Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata	1,205,465,000.00	1,205,465,000.00	99.41	998,905,664.00	82.86	206,559,336.00	17.14
41	Penyelenggaraan Pemilihan Putra - Putri Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	960,436,000.00	936,664,000.00	91.67	722,247,039.00	77.11	214,416,961.00	22.89
42	Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Kuliner	131,301,000.00	131,301,000.00	100.00	115,059,000.00	87.63	16,242,000.00	12.37

43	Pengembangan Industri Perfilman, animasi, video dan fotografi	373,820,000.00	373,820,000.00	100.00	292,008,300.00	78.11	81,811,700.00	21.89
44	Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	84,415,500.00	84,415,500.00	100.00	47,966,800.00	56.82	36,448,700.00	43.18
45	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah	111,315,500.00	86,865,500.00	100.00	84,968,000.00	97.82	1,897,500.00	2.18

Pagu anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 sebesar Rp **36,123,158,928,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp **9,768,079,403,-** dan belanja langsung sebesar Rp **26,355,079,525,-**. Dengan Realisasi anggaran sebesar Rp **29,587,313,774,-** atau 81,91% yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. **9,023,902,426,-** atau 92,38% dan belanja langsung sebesar Rp **20,563,411,348.00** atau 78,02%.

BAB IV Penutup

Kedudukan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam pembangunan kepariwisataan nasional semakin jelas dengan ditetapkannya Bangka Belitung (KSPN Tanjung Kelayang) sebagai 10 Destinasi prioritas/unggulan nasional. Tentunya hal ini terjadi dikarenakan Bangka Belitung memiliki potensi dan kondisi yang sangat baik untuk pembangunan di bidang kepariwisataan. Bagi daerah tentunya ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah kita, karena banyak dukungan yang akan diberikan oleh pusat dengan komitmen yang sudah disampaikan itu.

Demikian juga di bidang kebudayaan walaupun terjadi permasalahan pada kewenangan, akan tetapi dengan diakuinya beberapa warisan budaya daerah Bangka Belitung sebagai Kekayaan Budaya Nasional oleh pusat, tentunya harus ditindaklanjuti dengan upaya-upaya pelestariannya. Tentunya daerah harus menjaga kondisi ini untuk terus menjadi lebih baik dengan harapan dapat berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah..

Pada dasarnya pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan PD adalah upaya pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan atau upaya pemenuhan kebutuhan yang sedang terjadi atau dibutuhkan di suatu daerah. Karena pada dasarnya permasalahan pembangunan itu timbul karena ketidakmampuan daerah atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Keberhasilan program tentu berkorelasi dengan keberhasilan daerah dalam melaksanakan fungsinya dan dalam implementasinya, peran ini dilaksanakan oleh PD sebagai pelaksana teknis kewenangan daerah tersebut. Tentunya dalam konteks pembangunan, semua program kegiatan yang dilaksanakan adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, demikian disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2019 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata



Drs. RIVAL
Pembina Utama Madya
NIP. 19600604 198701 1 001